



PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2024



KATA PENGANTAR

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, serta adanya pergeseran nilai manajemen pemerintahan menjadi manajemen pemerintahan berbasis kinerja maka implementasi SAKIP harus menjadi komitmen yang berorientasi pada berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan (Bappeda Litbang) sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota mendukung komitmen melalui penyusunan LKjIP Tahun 2024. Hal ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 ini menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Evaluasi LKjIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 diperlukan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang.

Balikpapan, 25 Maret 2025
Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan



MURNI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen RPJMD. Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Secara umum, Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada Tahun 2024 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari tiga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja yang menjadi target pada Tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar **98,06%**, dengan uraian capaian pada sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial dengan capaian **97,83%**, sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah dengan capaian **90,81%**, serta sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan capaian **105,53%**.

Adapun beberapa kendala yang dialami dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah tingkat kematangan dan keberagaman inovasi yang disampaikan belum optimal, serta beberapa inovasi yang dihasilkan perangkat daerah tidak berlanjut ketika terjadi pergantian/mutasi pejabat. Selain itu adanya perubahan regulasi dalam evaluasi SAKIP, sehingga ada perubahan tata cara penilaian dan jumlah serta bobot setiap komponen yang dievaluasi. Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang dapat diuraikan sebagai berikut: memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam menyampaikan aspirasi atau usulan program dan kegiatan pembangunan; melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian, studi dan kajian yang belum ditindak lanjuti oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan ataupun OPD teknis lainnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Perencanaan Strategis.....	6
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	34
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	42
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	42
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	45
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	45
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	47
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	48
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja).....	49
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	50
3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	72
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	100
BAB IV PENUTUP.....	104
4.1 Kesimpulan.....	104
4.2 Saran.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan.....	7
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan.....	8
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	10
Tabel 2.4	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2024 Kota Balikpapan Bappeda Litbang.....	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2024.....	36
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024.....	38
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Tahun 2023 per Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	38
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran Sasaran Strategi.....	41
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024.....	42
Tabel 3.2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2024.....	44
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	45
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	46
Tabel 3.5	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	47
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	48
Tabel 3.7	Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024.....	51
Tabel 3.8	Hasil Evaluasi SAKIP Kota Balikpapan.....	52
Tabel 3.9	Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 2 pada Tahun 2024.....	55
Tabel 3.10	Inovasi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024.....	58
Tabel 3.11	Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 3 Pada Tahun 2024.....	64
Tabel 3.12	Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Litbang.....	64
Tabel 3.13	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Bappeda Litbang menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	66
Tabel 3.14	Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp).....	68
Tabel 3.15	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	71
Tabel 3.16	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 1..	73
Tabel 3.17	Paket Pekerjaan Infrastruktur Pilot Project CIP Program NUDP Berdasarkan Perangkat Daerah.....	94
Tabel 3.18	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 2..	96
Tabel 3.19	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 3..	99
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024...	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024.....	17
Gambar	3.1	Grafik Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	46
Gambar	3.2	Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.....	50
Gambar	3.4	Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan 2021-2024.....	60
Gambar	3.5	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil negara (ASN) Bappeda Litbang Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja dari program dan kegiatan yang ada di suatu instansi.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis 2021-2026, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada tahun mendatang. Laporan ini berisi tentang pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Penyertaan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang Pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan

tiga fungsi utama, yaitu: perumusan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui, antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan OPD lain;
2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundangundangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kota Balikpapan serta antar SKPD;
4. Belum optimalnya keselarasan legislatif dan eksekutif;
5. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasilhasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan;
8. Belum optimalnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan untuk hal yang sama;
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka Panjang;
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor;
4. Pengendalian evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan PD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi (Aplikasi SIPD);
2. Tersedianya dukungan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi organisasi;

3. Adanya peluang peningkatan kompetensi ASN di bidang perencanaan melalui pengembangan jabatan fungsional;
4. Adanya kebijakan nasional dan provinsi yang membutuhkan peran serta daerah dalam pencapaian targetnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan secara singkat latar belakang penyusunan LAKIP, Struktur organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta permasalahan utama
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Memuat Rencana Strategis 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Memuat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran
4. Bab IV Penutup
Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Wali Kota Balikpapan yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi yang telah ditetapkan. Bappeda Litbang Kota Balikpapan termasuk dalam misi ke-1 yakni “Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik”.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Balikpapan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam waktu lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappeda Litbang Kota Balikpapan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel		Nilai SAKIP	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, Integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja	56,22	56,24	56,25	56,27	56,28
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, oengembangan, dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	60	62	63	64	65
		Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	32,5	33	34	35	36

Sumber : Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, diperlukan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan. Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan mensinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu lima tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Bappeda Litbang Kota Balikpapan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pusat dan provinsi	Memperkuat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi
		Meningkatkan keselarasan , konsistensi dan integrasi dokumen perencanaan pembangunan kota	Penguatan kompetensi SDM perencana kota
			Memperkuat sistim penyediaan dan pemanfaatan satu data kota
			Penguatan koordinasi perencanaan antar OPD
		Meningkatkan peran stakeholder dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan	Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan peran jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan	Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pembentukan jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	Optimalisasi desiminasi, pemanfaatan dan fasilitasi inovasi serta hasil kajian/penelitian tingkat pemerintahan maupun masyarakat	Penguatan kebijakan yang mendukung desiminasi, pemanfaatan dan fasilitasi inovasi serta hasil kajian/penelitian tingkat pemerintahan maupun masyarakat
	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan untuk penerapan reformasi birokrasi	Memperkuat kebijakan yang mendukung penerapan reformasi birokrasi

Sumber : Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026

Indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen RPJMD. Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Berikut di sajikan indikator kinerja Bappeda Litbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang di sertai sasaran, program, kegiatan level perangkat daerah, dan indikator SDG's serta indikator makro yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Rentang Nilai	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	0-100	68,99	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58	75,58	Tujuan
Meningkatnya kualitas perencanaan yang holistik- tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja	Nilai	0-60	51,74	56,22	56,24	56,25	56,27	56,28	56,28	Sasaran
	Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja dan capaian kinerja	Nilai	0-30	29,83	32,76	32,769	32,778	32,787	32,796	32,796	Program
	Indeks kualitas perencanaan aspek proses	Nilai	0-10	NA	NA	1,82	1,87	1,92	1,98	1,98	Kegiatan
	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Persen	0-100%	NA	100	100	100	100	100	100	Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Rentang Nilai	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indeks kualitas perencanaan aspek jaminan tindak lanjut	Nilai	0-10	NA	NA	2,89	2,97	3,06	3,14	3,14	Kegiatan
	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Nilai	0-30	21,51	23,46	23,466	23,472	23,478	23,484	23,484	Program
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	0-100%	81,23	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	0-100%	90,91	100	100	100	100	100	100	Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Rentang Nilai	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	0-100%	70,27	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah	Nilai	100	54	60	62	63	64	65	65	Sasaran
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen	0-100%	100	100	100	100	100	100	100	Program
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	Persen	0-100%	100	100	100	100	100	100	400	Kegiatan
	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Persen	0-100%	100	100	100	100	100	100	100	Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Rentang Nilai	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	0-100%	100	100	100	100	100	100	100	Kegiatan
	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	Laporan	-	-	6	4	6	4	5	25	Kegiatan
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	0-100	31,52	32,5	33	34	35	36	36	Sasaran
	Nilai indeks kepuasan masyarakat (Internal)	Nilai	0-100	85,47	85,5	85,55	85,6	85,65	85,7	85,7	Program
	Nilai SAKIP OPD	Nilai	0-100	82,88	82,98	83,08	83,18	83,28	83,38	83,38	Kegiatan
	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Nilai	0-100	85,71	85,75	85,8	85,85	85,9	85,95	85,95	Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Rentang Nilai	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Nilai	0-100	83,48	83,5	83,55	83,6	83,65	83,7	83,7	Kegiatan
	IKM layanan administrasi umum perangkat daerah	Nilai	0-100	85,47	85,5	85,55	85,6	85,65	85,7	85,7	Kegiatan
	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai	0-100	81,96	82	82,05	82,1	82,15	82,2	82,2	Kegiatan
	IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai	0-100	85,39	85,45	85,5	85,55	85,6	85,65	85,65	Kegiatan
	IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai	0-100	81	81,05	81,1	81,15	81,2	81,25	81,25	Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Rentang Nilai	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Kegiatan	-	0	1	1	0	0	0	2	SDG's
	Jumlah alokasi pemerintah menyiapkan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Rupiah	-	Rp53.150.000	Rp260.000.000	Rp265.000.000	Rp270.000.000	Rp275.000.000	Rp280.000.000	Rp1.350.000.000	SDG's
	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Nilai	-	0,62	0,625	0,63	0,635	0,64	0,645	0,645	SDG's
	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Nilai	-	3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	3,31	3,31	SDG's
	PDB per kapita	Nilai	-	155,98	168,06	175,54	183,96	193,44	204,08	204,08	SDG's

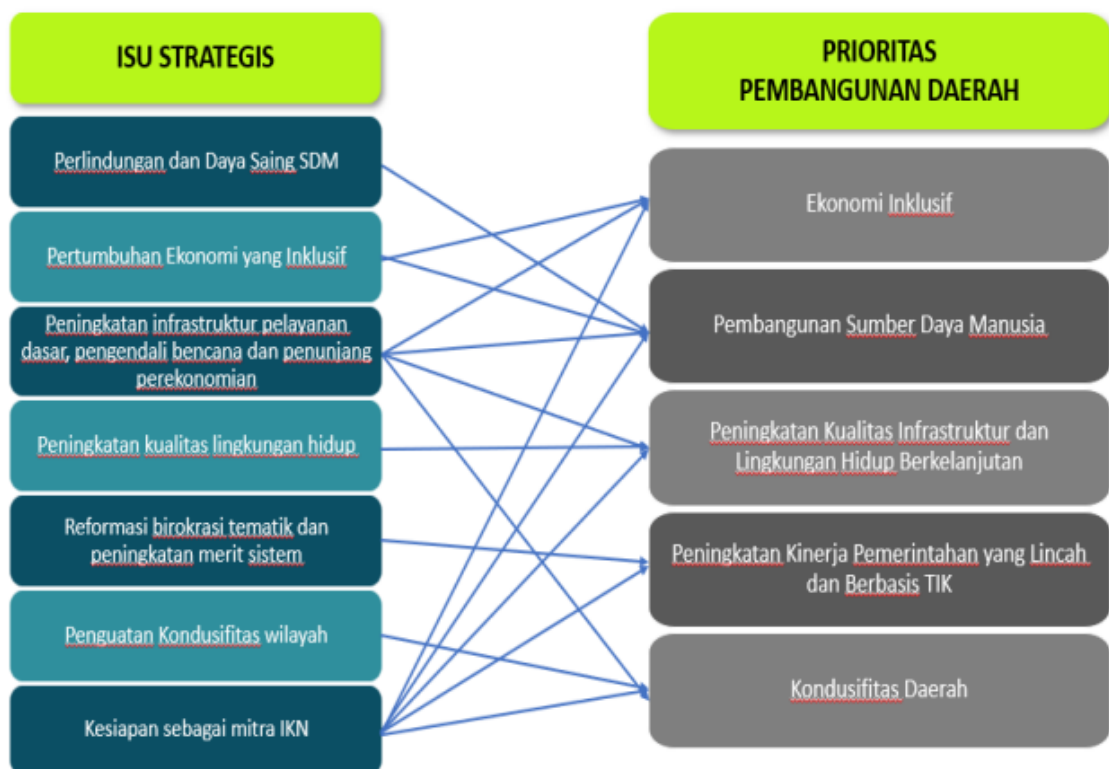
Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Rentang Nilai	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
				2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Nilai	-	4,78	4,79	4,8	4,81	4,82	4,83	4,83	SDG's
	Laju Inflasi	Nilai	-	0,65%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	3,5 + 1%	Indikator Makro

Sumber : Dokumen Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026

Penyusunan perencanaan pembangunan kota Balikpapan tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Permasalahan utama pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka merespon tantangan perpindahan IKN;
2. Pembangunan ekonomi inklusif perlu ditingkatkan dalam rangka merespon ketimpangan yang terjadi di Kota Balikpapan;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan perlu ditingkatkan;
4. Penguatan kinerja pemerintahan daerah yang lincah dan berbasis TIK perlu ditingkatkan; dan
5. Kondusifitas daerah perlu ditingkatkan.

Tema pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 pada tahun 2024 yaitu "mempertahankan kondusivitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan berkelanjutan". Tema tersebut digunakan sebagai tema RKPD Kota Balikpapan tahun 2024 dengan prioritas pembangunan yang difokuskan untuk mengatasi isu strategis tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024

Sumber : RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Dalam mendukung prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2024 dengan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Bappeda Litbang melaksanakan unsur penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, maka Bappeda Litbang pada tahun 2024 menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan;
 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- c. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Selain melaksanakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan Bappeda Litbang juga melaksanakan program non urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selain rencana kerja murni tahun 2024, pada tahun 2024 juga disusun rencana kerja perubahan. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Berikut adalah rencana kerja tahun 2024 yang sudah disesuaikan dengan Renja Perubahan Tahun 2024 beserta usulan pendanaan pagu indikatif yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2024 Kota Balikpapan Bappeda Litbang

N O	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023								KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							18.749.874.000	19.486.188.400	19.421.724.000	671.850.000							19.182.151.000	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							18.749.874.000	19.486.188.400	19.421.724.000	671.850.000							19.182.151.000	
	5.01	PERENCANAAN							14.929.874.000	15.566.188.400	15.351.724.000	421.850.000							17.257.151.000	
1 ,	5.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				85,60 nilai	85,60 nilai	11.304.874.000	11.971.188.400	11.513.724.000	1.592.277.000							12.897.151.000	
	5.01. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD				83,18 nilai	83,18 nilai	5.000.000	0,00	0,00	-5.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		5.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	0,00	0,00	-5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				85,85 nilai	85,85 nilai	8.000.000.000	8.636.314.400	7.821.850.000	-178.150.000			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		9.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/ bulan	448 Orang/ bulan	8.000.000.000	8.636.314.400	7.821.850.000	-178.150.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			9.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023											KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				83,6 nilai	83,6 nilai	730.000.000	726.934.100	766.934.100	36.934.100			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		900.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	85 Paket	80.000.000	0,00	0,00	-80.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				47 Orang	70 Orang	650.000.000	0,00	0,00	-650.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				85,6 nilai	85,6 nilai	1.306.760.000	1.299.341.900	1.892.325.900	585.565.900			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.752.151.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	297 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023											KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01. 01.2. 06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	18 Paket	280.000.000	0,00	0,00	-280.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
	5.01. 01.2. 06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	16902 Paket	400.000.000	0,00	0,00	-400.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
	5.01. 01.2. 06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	32826 Paket	80.000.000	0,00	0,00	-80.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
	5.01. 01.2. 06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				480 Dokumen	1040 Dokumen	6.760.000	0,00	0,00	-6.760.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
	5.01. 01.2. 06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25 Laporan	30.000.000	0,00	0,00	-30.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01. 01.2. 06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	90 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85,55 nilai	85,55 nilai	763.000.000	773.706.000	470.117.000	-292.883.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		680.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	0,00	0,00	-4.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	24.000.000	0,00	0,00	-24.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 0	35.000.000	0,00	0,00	-35.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023											KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01. 01.2. 08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	700.000.000	0,00	0,00	-700.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81,15 nilai	81,15 nilai	500.114.000,00	534.892.000	562.497.000	62.383.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		560.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	216.114.000,00	216.114.000	216.114.000	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	161.000.000	0,00	0,00	-161.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023											KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01. 01.2. 09.0 005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				232 Unit	0 Unit	15.000.000	0,00	0,00	-15.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				188 Unit	73 Unit	58.000.000	0,00	0,00	-58.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 01.2. 09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000	0,00	0,00	-50.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 02.2. 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses				1,87	1,87	1.710.000.000	1.760.000.000	1.752.000.000,00	42.000.000			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 02.2. 01.0 005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	3 Berita Acara	1.710.000.000	1.760.000.000	1.752.000.000,00	42.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01. 02.2. 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan				100 %	100 %	1.135.000.000	1.060.000.000	1.021.000.000	-114.000.000			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		1.900.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 02.2. 02.0 001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	16 Dokumen	800.000.000	0,00	0,00	-800.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 02.2. 02.0 003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	335.000.000	0,00	0,00	-335.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 02.2. 03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut				2,97	2,97	750.000.000	775.000.000	1.065.000.000	315.000.000			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 02.2. 03.0 003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	2 Laporan	750.000.000	0,00	0,00	-750.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023											KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 ,	5.01. 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja				22,662 nilai	22,662 nilai	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00							60.000.000,00	
	5.01. 03.2. 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100 %	100 %	10.000.000	0,00	0,00	-10.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 03.2. 01.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	0,00	0,00	-5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 03.2. 01.0 008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	0,00	0,00	-5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 03.2. 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100 %	100 %	10.000.000	0,00	0,00	-10.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01. 03.2. 02.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	0,00	0,00	-5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 03.2. 02.0 008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	0,00	0,00	-5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 03.2. 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100 %	100 %	10.000.000	0,00	0,00	-10.000.000			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01. 03.2. 03.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	0,00	0,00	-5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023											KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01. 03.2. 03.0 008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	0,00	0,00	-5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N							3.820.000.000	3.920.000.000	4.070.000.000	250.000.000							1.925.000.000	
1 ,	5.05. 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembang an yang Ditindaklanj uti				100 %	100 %	3.820.000.000	3.920.000.000	4.070.000.000	-1.895.000.000							1.925.000.000	
	5.05. 02.2. 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembang an Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000	350.000.000	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 01.0 004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	1 Laporan	325.000.000	0,00	0,00	-325.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023											KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05. 02.2. 01.0 012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	0,00	0,00	-25.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangana Bidang Sosial dan Kependudukana yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 02.0 003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangana n Pendidikan dan Kebudayaan				-	1 0	600.000.000	0,00	0,00	-600.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 02.0 006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangana n Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	0,00	0,00	-500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023											KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05. 02.2. 03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	1.620.000.000	1.620.000.000	1.620.000.000	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		850.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 03.0 004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000	0,00	0,00	-270.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 03.0 007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	0,00	0,00	-500.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 03.0 009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000	0,00	0,00	-850.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi				4 dokumen	4 dokumen	750.000.000	850.000.000	1.000.000.000	250.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur		875.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023											KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05. 02.2. 04.0 002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mode l Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	0,00	0,00	-150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 04.0 003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	2 Laporan	300.000.000	0,00	0,00	-300.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05. 02.2. 04.0 004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000	0,00	0,00	-175.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05. 022. 04.0 005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	0,00	0,00	-125.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	J U M L A H								18.749.874.000	19.486.188.400	19.421.724.000	1.151.195.571. 740							19.182.151.000	

Sumber : Website SIPD RI Kemendagri

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang merupakan parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Bappeda Litbang, sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas merancang dan mengimplementasikan rencana pembangunan daerah berbasis penelitian dan pengembangan. Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria yang memadai, yaitu:

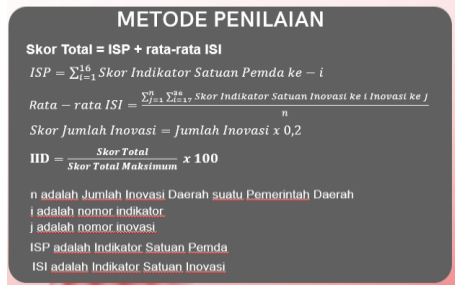
1. **Specific (Spesifik)**: Indikator harus jelas dan spesifik dalam menggambarkan apa yang akan diukur. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kebingungan atau tumpang tindih dalam pengertian indikator tersebut;
2. **Measurable (Terukur)**: Indikator harus dapat diukur dengan cara yang konsisten dan obyektif. Ini memungkinkan untuk memantau kemajuan serta mengevaluasi pencapaian target;
3. **Achievable (Dapat Dicapai)**: Indikator harus realistis dan dapat dicapai dalam konteks sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mendorong motivasi dan memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat diwujudkan;
4. **Relevant (Relevan)**: Indikator harus relevan dengan tujuan dan strategi organisasi. Ini berarti indikator harus memperhitungkan secara langsung kontribusi terhadap pencapaian tujuan utama;
5. **Time-bound (Berbatas Waktu)**: Indikator harus memiliki batasan waktu yang jelas, artinya ada tenggat waktu kapan target harus dicapai. Ini membantu dalam mengatur prioritas, mengukur progres, dan mengevaluasi kinerja secara periodik.

Hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 yang merekomendasikan agar seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU dan menggunakan IKU yang selaras dengan kebijakan Permenpanrb Nomor 3 Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Litbang Kota Balikpapan melakukan perubahan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

Kepala Bappeda Litbang nomor: 188.4.46/1359/Bappeda Litbang tanggal 22 Desember 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan. Adapun IKU perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	RENTANG NILAI	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai 0-100	Indikator ini adalah indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja yang menjadi tugas dan fungsi dari Bappeda Litbang Kota Balikpapan		LHE KemenPAN- RB	Kepala Badan
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Nilai 0-100	Sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan		Nilai hasil indeks inovasi daerah keluaran Mendagri	Kepala Badan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	RENTANG NILAI	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai 0-100	Indikator ini adalah indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang diperoleh dari LHE AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kita Balikpapan		LHE AKIP	Kepala Badan

Sumber : SK IKU Perubahan Bappeda Litbang

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja ditetapkan setiap tahun dengan mencantumkan target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun yang merupakan penugasan Wali Kota kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan
Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	43,82
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Nilai	63
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	72

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2024

Pencapaian Sasaran di atas, didukung dengan empat program yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2024 Bappeda Litbang Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.19.486.188.400,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 19.439.148.000,-. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran Belanja Tahun 2024 per Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Uraian	Pagu	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.531.148.000	APBD-P
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.839.274.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.839.274.000	APBD-P
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	766.934.100	APBD-P
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	766.934.100	APBD-P
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.892.325.900	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.100	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	424.362.800	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	441.207.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.760.000	APBD-P
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.000.000	APBD-P
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.117.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.996.600	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.963.500	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.967.640	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.189.260	APBD-P
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.497.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.114.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.383.000	APBD-P
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.838.000.000	APBD-P

Uraian	Pagu	Keterangan
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.752.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1.752.000.000	APBD-P
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.021.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	812.376.500	APBD-P
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	208.623.500	APBD-P
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.065.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.065.000.000	APBD-P
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.070.000.000	APBD-P
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	350.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	325.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	25.000.000	APBD-P
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.100.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	600.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	500.000.000	APBD-P
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.620.000.000	APBD-P
Sub kegiatan penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	270.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	500.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	850.000.000	APBD-P
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.000.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	150.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	550.000.000	APBD-P

Uraian	Pagu	Keterangan
Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	175.000.000	APBD-P
Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	125.000.000	APBD-P
TOTAL	19.439.148.000	APBD-P

Sumber : DPA Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disajikan matriks anggaran setiap sasaran strategis pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	3.838.000.000,-	19,74%	-
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	4.070.000.000,-	20,93%	-
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	11.531.148.000,-	59,32%	-

Sumber : DPA Perubahan Bappeda Litbang Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Berikut adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan:

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Bappeda Litbang Kota Balikpapan

	Komponan Yang Nilai	Bobot	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,06	23,68
2	Pengukuran Kinerja	30 %	17,04	20,71
3	Pelaporan Kinerja	15 %	11,23	12,30
4	Evaluasi Kinerja	25 %	17,11	19,30
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	68,43	75,98
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Sumber : LHE AKIP Bappeda Litbang Tahun 2024

Hasil evaluasi atas AKIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya dan peningkatan predikat B menjadi BB (sangat baik). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem manajemen kerja yang andal. Penjelasan lebih lanjut atas evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja sesuai dengan mandat;
- Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- Dokumen perencanaan kinerja yaitu Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu;
- Sebagian besar isu strategis telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai;
- Sebagian besar indikator kinerja pada Renstra dan Perjanjian Kinerja telah memenuhi kriteria SMART;
- Sebagian besar anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung pada kinerja yang ingin dicapai;

- Sebagian besar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik namun tidak cukup/kurang menantang;
- Rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis karena hasil monitoring dan evaluasi sebagian kecil di evaluasi.

2. Pengukuran Kinerja

- Telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator;
- Sudah terdapat mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja yang ditetapkan dengan sebagian besar kriteria terpenuhi;
- Data kinerja dikumpulkan sebagian relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu per triwulan;
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
- Pemimpin terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang didapat dari perbaikan kegiatan/aktivitas yang tidak berdampak terhadap kinerja (*outcome/impact*);
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu;
- Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan secara luas (dapat diakses masyarakat luas);
- Dokumen laporan kinerja telah diformalkan;
- Dokumen laporan kinerja sebagian besar telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Laporan kinerja sebagian besar telah mengungkapkan informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja;
- Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun hanya bersifat sebagian;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja, namun belum menyeluruh.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja sebelumnya telah ditindaklanjuti;
- Telah terjadi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja (*outcome*) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun hanya sebagian indikator kinerja yang mengalami kenaikan capaian kinerja.

Berikut disajikan matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja
Bappeda Litbang Tahun Sebelumnya

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar melakukan perbaikan atas pohon kinerja sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, yang menginformasikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>), untuk kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi	Telah dilakukan perbaikan penyusunan pohon kinerja Bappeda Litbang yang mengacu pada pohon kinerja level/tingkat kota Balikpapan
2	Menyusun monitoring evaluasi rencana aksi dengan mencantumkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran serta memuat rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjutinya	Telah dilakukan monitoring evaluasi rencana aksi dengan lampiran data yang merupakan hasil laporan formulir E.81 dari aplikasi reaksi yang dilaksanakan setiap triwulan
3	Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan strategi guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Telah dilakukan survey internal kepada seluruh pegawai Bappeda litbang Kota Balikpapan
4	Agar menyusun SOP pengumpulan data kinerja, sehingga mekanisme pengeumpulan data kinerja dapat diandalkan	Telah disusun SOP pengumpulan data kinerja
5	Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Telah dilakukan survey internal kepada seluruh pegawai Bappeda litbang Kota Balikpapan

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
6	Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja	Terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,18%
7	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Sumber : Berita Acara Rapat Tindak Lanjut LHE SAKIP Bappeda Litbang Tahun 2024

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	<100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	>100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber : Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan

Berikut disajikan capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

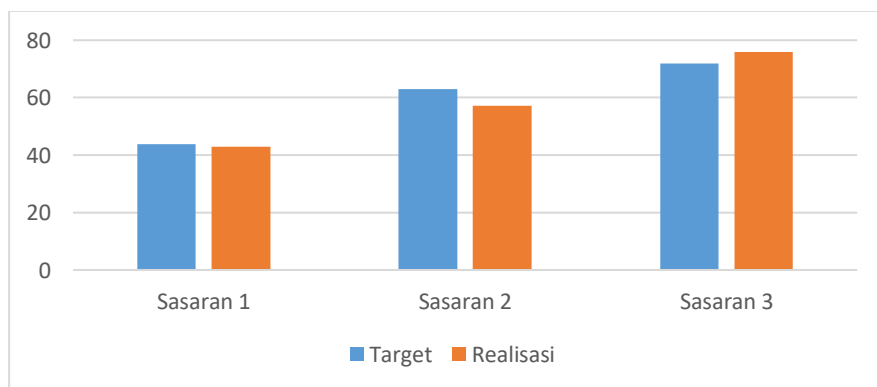
3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja Bappeda Litbang Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	43,82	42,87	97,83%	Tidak tercapai
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Nilai	63	57,21	90,81%	Tidak tercapai
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	72	75,98	105,53%	Melebihi target

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2024



Gambar 3.1 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024
Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2024

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 98,06%** pada tahun 2024. Dengan demikian maka secara umum Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam

bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Litbang tahun 2021-2026.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	-	-	42,76	100,94%	42,87	97,83%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	57,88	89,80%	39,41	63,56%	57,21	90,81%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	83,35	100,45%	68,43	82,36%	75,98	105,53%

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2024

Sasaran 1:

Sasaran ini mengalami penurunan sebesar 3,11% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian target menjadi lebih tinggi dari realisasi tahun 2023. Namun hasil evaluasi dari KemenpanRB untuk SAKIP Kota Balikpapan untuk tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan.

Sejak tahun 2023, terdapat perubahan dalam perhitungan capaian nilai SAKIP. Hal ini dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terhadap perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya.

Sasaran 2:

Sasaran ini mengalami peningkatan sebesar 27,25% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan inovasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun penjelasan lebih rinci terhadap capaian sasaran ini akan dibahas lebih lengkap pada sub bab berikutnya.

Sasaran 3:

Sasaran ini mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 23,17% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan karena komitmen dari Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam memenuhi setiap arahan dan rekomendasi dari AKIP Kota Balikpapan dalam hal perbaikan SAKIP dari tahun sebelumnya.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Berikut ini capaian kinerja sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{5}{6} \times 100$
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	42,87	56,28	76,17%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Nilai	57,21	65	88,02%

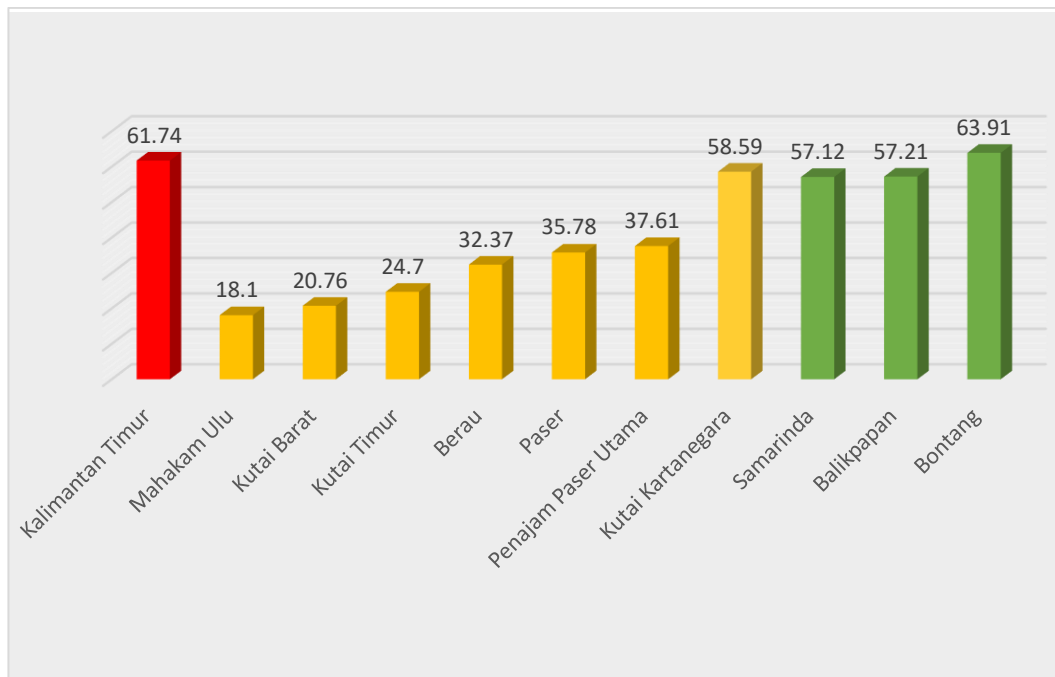
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{5}{6} \times 100$
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	75,98	-	-

Sumber : Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 capaiannya sebesar 76,17% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (2026), hal ini terlihat masih jauh dari target, namun dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan bobot dan pengurangan 1 komponen pada indikator sasaran ini, sehingga antara realisasi 2024 dengan target 2026 dapat dikatakan tidak relevan (tidak dapat disandingkan). Sedangkan untuk sasaran 2, tingkat capaian sebesar 88,02% jika dibandingkan target akhir Renstra, untuk itu perlu meningkatkan strategi kinerja untuk pencapaian target kedepannya. Untuk sasaran 3 tidak dapat dipersandingkan, Sasaran ini mengalami perubahan karena pengukuran indikator Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan dengan telah ditetapkannya Permenpan RB No. 3 Tahun 2023, sehingga terjadi perubahan sasaran strategis yang semula Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (sebagaimana tertuang pada dokumen Renstra 2021-2026) menjadi Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

Bappeda Litbang Kota Balikpapan tidak secara langsung mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun pada standar nasional/internasional, sehingga tidak ada indikator kinerja SPM yang dapat dipersandingkan. Namun terdapat satu indikator kinerja utama yaitu indeks inovasi daerah yang nilai nya dapat di bandingkan dengan nilai yang di peroleh Provinsi Kalimantan Timur, maupun nilai yang diperoleh kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Perbandingan tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.2
Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur
 Sumber : SK Mendagri Nomor 400.10.11- 4898 Tahun 2024 Tentang
 Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan gambar di atas, nilai indeks inovasi daerah Kota Balikpapan menempati urutan ke dua jika di bandingkan dengan kota yang ada di Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda dan Kota Bontang. Jika di bandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menempati urutan ke tiga setelah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Apabila di bandingkan dengan nilai indeks inovasi daerah Provinsi Kalimantan Timur, masih terdapat *gap* yang signifikan dikarenakan Provinsi Kalimantan Timur sudah mendapatkan predikat sangat inovatif sedangkan Kota Balikpapan masih memperoleh predikat Inovatif.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Untuk menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

- I. **Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial.

Berikut di sajikan ikhtisar capaian kinerja sasaran 1 tahun 2024 yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 1 Pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja		
				Tidak Tercapai <100%	Tercapai/ Sesuai Target =100%	Melebihi Target >100%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	97,83%	√		

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2024

Dari table 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 1 dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja** menunjukkan nilai capaian kinerja **97,83 %** dengan realisasi kinerja **42,87** dari target **43,82**. Bappeda Litbang Kota Balikpapan menjalankan tupoksi yang mendukung misi ke 1 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sasaran ini sekaligus menjadi tujuan Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota Kota Balikpapan yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi yang telah ditetapkan, Bappeda Litbang Kota Balikpapan mengampu tugas pencapaian target nilai Sakip 2 komponen Sakip level kota, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian 30%:
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian 30% :

Capaian indikator di atas berdasarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap komponen perencanaan dan pengukuran kinerja yang menjadi tugas dan fungsi dari Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Tujuan dari evaluasi SAKIP adalah untuk melihat tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi sebagaimana surat dari KemenPAN-RB Nomor B/422/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh nilai 69,06 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Evaluasi SAKIP Kota Balikpapan

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	22,50	22,53
b. Pengukuran Kinerja	30	20,26	20,34
c. Pelaporan Kinerja	15	9,46	9,48
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,53	6,71
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,75	69,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kota Balikpapan Tahun 2024

Pemerintah Kota Balikpapan terus melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan SAKIP yang dilakukan baik tingkat kota maupun perangkat daerah. Secara umum capaian terhadap target sudah baik. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

1. Memperhatikan hasil evaluasi SAKIP dan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan;
2. Adanya koordinasi yang baik antar instansi, terutama dengan perangkat daerah pengampu komponen Sakip Kota Balikpapan yaitu Bappeda Litbang, Inspektorat dan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Walaupun capaian realisasi indikator sudah tergolong kategori **Sangat Tinggi**, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa catatan perbaikan yang dijabarkan berikut ini:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja terdapat beberapa catatan yaitu :

- a. Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya melakukan perbaikan pohon kinerja, namun belum menerapkan prinsip penyusunan dan penjenjangan kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
- b. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan reviu dokumen perencanaan, namun masih terdapat sasaran strategis yang tidak sinkron antara tingkat Pemda dan perangkat daerah sesuai dengan level jenjang nya, seperti pada tingkat Pemda terdapat sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan” sementara pada level perangkat daerah memiliki sasaran “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”.
- c. Masih terdapat rumusan indikator kinerja di perangkat daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Bond*), dan cukup, seperti indikator “Presentase Koperasi Berkualitas” pada sasaran “Meningkatnya Koperasi Berkualitas” atau indikator “Tingkatan Hunian Akomodasi” pada sasaran “Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan”;
- d. Penetapan target kinerja dalam perjanjian kinerja dalam perangkat daerah belum sepenuhnya di dasari pada data yang andal sehingga terdapat target yang tidak sinkron dan tidak relevan dengan target kinerja di tingkat pemerintah daerah;
- e. Penetapan target belum berdasarkan capaian target sebelumnya baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah, sehingga masih di temukan penetapan target yang lebih rendah di bandingkan dengan realisasi sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Balikpapan telah memanfaatkan teknologi dalam pengukuran kinerja melalui aplikasi Reaksi, namun pemanfaatannya belum dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi dari Pemda sampai ke tingkat individu pegawai;
- b. Pengukuran kinerja organisasi yang telah dijalankan belum digunakan sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*.

Beberapa solusi/upaya telah dilakukan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator dari KemenPAN-RB untuk Kota Balikpapan, yaitu:

1. Melakukan revaluasi dan menyempurnakan hasil penjenjangan kinerja pada seluruh kinerja di tingkat Pemda sampai urusan di tingkat perangkat daerah, dengan memperhatikan prinsip penjenjangan kinerja yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
2. Melakukan revaluasi dan perbaikan terhadap sasaran strategis yang ada pada dokumen perencanaan baik Pemda maupun perangkat daerah agar sesuai dengan level jenjangnya masing-masing;
3. Melakukan revaluasi terhadap indikator kinerja yang digunakan agar memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Bound*) dan cukup baik level Pemda maupun perangkat daerah;
4. Melakukan revaluasi penetapan target kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah agar selaras dengan target kinerja yang ditetapkan di tingkat Pemda. Penetapan target kinerja juga agar disertai dengan data dan bukti dukung yang andal dan relevan agar target kinerja akurat;
5. Mendorong penyempurnaan aplikasi REAKSI dan pemanfaatannya dalam pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah sampai ke tingkat individu pegawai;
6. Mendorong adanya pemberian *reward and punishment* yang didasarkan pada capaian kinerja organisasi;

7. Melengkapi laporan kinerja Pemda maupun perangkat daerah dengan analisis *benchmark* capaian Pemda lain, sehingga dapat terlihat posisi kinerja Pemda pada tingkat regional se-provinsi maupun tingkat nasional;
8. Melakukan dan memperkuat ke dalaman reviu terhadap laporan kinerja baik di tingkat perangkat daerah agar anaisis keberhasilan/kegagalan dapat di andalkan untuk memberi gambaran atas kondisi capaian kinerja;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilai nya di bandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan menggambarkan peningkatan kinerja;
10. Mendorong evalusai akuntabilitas kinerja internal dapat di lakukan pada tahun berjalan sehingga dapat segera di lakukan tindak lanjut pada perangkat daerah serta dapat mendorong perbaikan atas kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah yang berdampak pada kualitas SAKIP Pemerintah Daerah;
11. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas internal agar menggambarkan kondisi *riil* dan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di perangkat daerah.

II. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah.

Berikut di sajikan ikhtisar capaian kinerja sasaran 2 tahun 2024 yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 2 pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja		
				Tidak Tercapai	Tercapai/ Sesuai Target	Melebihi Target
				<100%	=100%	>100%
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	90,81%	√		

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2024

Dari tabel 3.9 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 2 dengan indikator kinerja **Indeks Inovasi Daerah** menunjukkan nilai capaian kinerja **90,81%** dengan realisasi kinerja **57,21** dari target **63**. Capaian indikator tersebut berdasarkan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan. Adapun metode pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan berikut ini:

METODE PENILAIAN

Skor Total = ISP + rata-rata ISI

$$ISP = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{Rata-rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{20} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i \text{ Inovasi ke } j}{n}$$

$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,2$$

$$IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
i adalah nomor indikator
j adalah nomor inovasi
 ISP adalah Indikator Satuan Pemda
 ISI adalah Indikator Satuan Inovasi

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Indeks ini ada beberapa indikator yang sangat menentukan Indikator Satuan Pemda (ISP) terdiri dari 16 indikator dan Indikator Satuan Inovasi (ISI) sebanyak 20 indikator. Indeks Inovasi Daerah dapat menggambarkan beberapa kondisi, seperti: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan produk, Kecepatan bisnis proses, Output Pengetahuan teknologi, dan Hasil kreatif.

Proses pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) dalam Sistem Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengalami perubahan dan perbaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya lebih berorientasi pada aspek kuantitas, maka sejak tahun 2021 dan 2022 mulai terjadi keseimbangan antara aspek kuantitas dan kualitas dalam penilaian inovasi.

Program dan kegiatan Indeks Inovasi Daerah juga mengandung nilai-nilai strategis yang secara langsung dapat memengaruhi dalam mengupayakan kemandirian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang inovatif. Nilai-nilai strategis dimaksud antara lain adalah:

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan;
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.;
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Profil inovasi daerah untuk penilaian dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang akan diusulkan oleh daerah dalam kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2024 ke Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) Tahun 2024 akan diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *E-Planning*, *E-Budgeting* dan lain sebagainya;
2. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya;
3. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam

bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Jenis inovasi daerah yang dilaporkan adalah :

1. Inovasi digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak

2. Inovasi Nondigital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Pada tahun 2024, Kota Balikpapan mengirimkan sebanyak 31 Inovasi, sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 3.10
Inovasi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

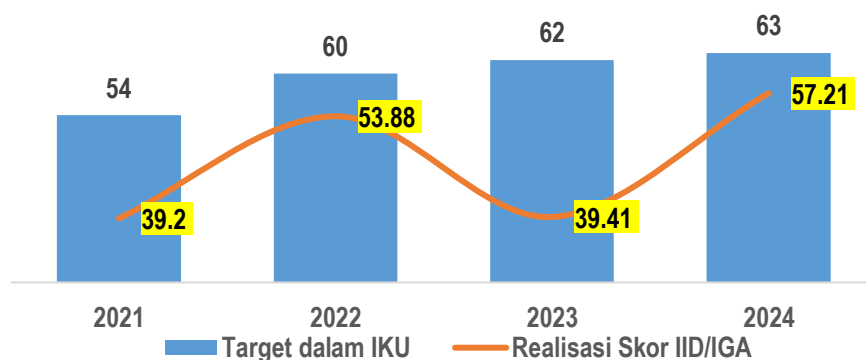
No	Judul Inovasi	Jenis
1	Layanan Pelaporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (LAPOR TRAMTIB)	Teknologi Informasi
2	Implementasi Pengelolaan dan Pemilahan Sampah/Plastik di Pantai Wisata Cemara (POKDARWIS) Kelurahan Manggar Baru	Teknologi Informasi
3	Sistem Pelaporan Pendataan Warga Nonpermanen di Wilayah RT Kelurahan Sepinggian Baru (SIPERAWAN)	Teknologi Informasi
4	Sistem Manajemen Penatusahaan Investaris Dalam Mengamankan Alat-alat Pemadam Kebakaran (SIMENTARI DAMKAR) di Wilayah kerja UPTD PBD Wilayah Tengah	Teknologi Informasi
5	Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat Di Kelurahan Sepinggian Baru (SINGA MAS SEBARU)	Teknologi Informasi
6	Sistem Informasi Layanan Sidang Tera Tera Ulang di UTPP Metrologi (SISTER)	Non Teknologi Informasi
7	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Berbasis Digital Melalui Website dan Media Sosial Kelurahan Prapatan Kota Balikpapan (DIGIWEB PRAPATAN)	Teknologi Informasi
8	SI PANDAI (Sistem Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini)	Teknologi Informasi

No	Judul Inovasi	Jenis
9	Gunung Bahagia Kompeten, Efektif, Efisien, Ramah, Responsif, Empati, Nyaman (GUBAH KEREN)	Non Teknologi Informasi
10	Optimalisasi Rekonsiliasi Laporan Keuangan Periodik Kota Balikpapan	Non Teknologi Informasi
11	Pro Vokasi Balikpapan (Percepatan Strategi Kolaborasi dalam Pendidikan Vokasi Balikpapan)	Non Teknologi Informasi
12	Penerapan Penanganan Sampah Organik dengan Metode Gorong-gorong Pada Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari	Non Teknologi Informasi
13	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data Inventaris Barang dengan Metode QR-CODE	Teknologi Informasi
14	Pengembangan Laporan Kegiatan Secara Tepat Waktu (PELATARANKU)	Non Teknologi Informasi
15	Kemitraan Poktan dan Pengusaha Pengolahan Ikan dalam Rangka Pengolahan Limbah Organik(Ikan) (KETAN SIMBAH)	Non Teknologi Informasi
16	Sistem Manajemen Program Kegiatan Kelurahan (SEMARAK) MUARA RPAK	Teknologi Informasi
17	Percepatan Strategi Kolaborasi dalam Pendidikan Vokasi (PRO VOKASI)	Non Teknologi Informasi
18	Optimalisasi Peran Serta Kader Pejuang (Peduli Jumat Berkah Atasi Stunting) Dalam Upaya Penurunan Percepatan Stunting	Non Teknologi Informasi
19	Kolaborasi dan sinergi Penataan Pemukiman Berkelanjutan Kota Balikpapan (KOTA KITA BALIKPAPAN)	Non Teknologi Informasi
20	Promosi/Pengenalan Kampung Nelayan Sebagai Destinasi Wisata Pantai di Kelurahan Manggar Baru (PEDAS PAKAN)	Non Teknologi Informasi
21	Sistem Arsip Digital Kelurahan Karang Jati (SI ADI KERJA)	Teknologi Informasi
22	Seed Bank (Bank Biji) Kebun Raya Balikpapan	Non Teknologi Informasi
23	Gerakan Kelurahan Siaga dan Sehat (GELAR SIASAT)	Teknologi Informasi
24	Rumah Integritas	Teknologi Informasi
25	Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat (SIMPEL DUMAS)	Teknologi Informasi

No	Judul Inovasi	Jenis
26	Daya Inklusif dan Kesenjangan Aksesibilitas	Teknologi Informasi
27	Optimalisasi Pengembangan Website UPTD BKAD (OPLET)	Teknologi Informasi
28	Layanan Siap Menikah Sehat (LASIMS..Yuk)	Teknologi Informasi
29	Perijinan Industri Rumah Tanga (ISTRI PA'RT)	Teknologi Informasi
30	Portal Kelurahan Mekar Sari (POKARI)	Teknologi Informasi
31	Sinergitas Pelayanan Pelaporan dalam Satu Genggaman	Teknologi Informasi

Sumber : Laporan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif

Metode pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) terus mengalami penyempurnaan. Sejak tahun 2021, perhitungan IID mulai menggunakan sistem poin atau nilai untuk memastikan evaluasi yang lebih terukur. Dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026, terdapat perbedaan metode perhitungan dibandingkan dengan realisasi nilai *Innovative Government Award (IGA)*. Hal ini mengakibatkan target awal yang ditetapkan relatif tinggi. Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam metode penghitungan, skor atau nilai yang diperoleh tetap berada dalam kategori Kota Inovatif, yang mencerminkan bahwa capaian inovasi daerah masih sesuai dengan standar yang baik, dimana perbandingannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.3 Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan 2021-2024

Sumber : Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024

Berdasarkan data gambar 3.2 di atas, dapat dianalisa bahwa terdapat selisih yang cukup signifikan antara target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi skor Indeks Inovasi Daerah (IID) setiap tahunnya. Target IKU terus meningkat dari 54 (2021) → 60 (2022) → 62 (2023) → 63 (2024), akan tetapi, realisasi skor IID/IGA mengalami fluktuasi, dengan nilai 39.2 (2021) → 53.88 (2022) → 39.41 (2023) → 57.21 (2024). Fluktuasi realisasi skor IID/ IGA pada tahun 2022, realisasi skor meningkat signifikan dari tahun sebelumnya (39.2 ke 53.88), pada tahun 2023, skor justru mengalami penurunan menjadi 39.41, meskipun target IKU tetap meningkat dan pada tahun 2024, skor kembali meningkat menjadi 57.21, tetapi masih di bawah target 63 IKU yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disebabkan oleh metode penghitungan yang berbeda antara target IKU dan realisasi IID/IGA. Meskipun terjadi perubahan metode penghitungan, Kota Balikpapan tetap berada dalam kategori kota inovatif, menegaskan bahwa inovasi daerah terus berjalan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam IKU 2021-2026.

Peningkatan skor realisasi IID/ IGA Tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Pedoman yang jelas dan komprehensif

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, telah mengeluarkan Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2022 serta Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah. Buku pedoman ini disusun berdasarkan Surat Mendagri No. 002.6/3857/SJ tanggal 6 Juli 2022 tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2022. Pedoman ini memberikan panduan operasional yang jelas bagi pemerintah daerah mengenai gambaran umum, kriteria, ketentuan penilaian, serta indikator teknis dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berperan sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah dilakukan melalui Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi SDM dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi daerah.

3. Waktu penginputan data yang cukup panjang

Proses pengisian Indeks Inovasi Daerah (penjaringan data) diberikan rentang waktu yang cukup panjang, yakni Juli hingga September 2024 (tiga bulan). Hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melengkapi dan menyempurnakan data sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

4. Koordinasi yang efektif

Keberhasilan capaian indikator kinerja juga didukung oleh koordinasi yang baik antara perangkat daerah. Kolaborasi ini memastikan kelengkapan data yang diperlukan dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA Tahun 2024.

Meskipun capaian skor realisasi mengalami peningkatan di Tahun 2024, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Tingkat kematangan inovasi yang belum optimal

Inovasi yang diajukan oleh perangkat daerah masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai tingkat kematangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri R.I.

2. Keberagaman inovasi yang terbatas

Kontribusi inovasi dari perangkat daerah masih belum merata, sehingga variasi dan cakupan inovasi yang dihasilkan belum maksimal.

3. Keberlanjutan inovasi

Beberapa inovasi yang ada pada perangkat daerah tidak berlanjut akibat pergantian atau mutasi pejabat di perangkat daerah, mengakibatkan hilangnya kesinambungan dalam implementasi inovasi.

Adapun langkah strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam mengatasi dan meningkatkan pencapaian indikator adalah berbagai sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan dari Kepala Daerah

Diterbitkannya Surat Wali Kota Balikpapan Nomor: 050/1810/Bappeda-Litbang tertanggal 29 Desember 2023, yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menginput data inovasi sebagai bagian dari persiapan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun berikutnya.

2. Reviu kebijakan inovasi daerah

Dilakukan evaluasi terhadap Keputusan Wali Kota Balikpapan Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah, guna memastikan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dalam mendukung ekosistem inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Penguatan regulasi melalui peraturan Wali Kota

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan inovasi, saat ini tengah disusun dan dibahas Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Inovasi Daerah, yang akan menjadi dasar hukum dalam mengatur inovasi secara lebih sistematis.

4. Pelaksanaan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA)

KRENOVA adalah agenda rutin yang diselenggarakan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan inovasi di kota ini. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah, siswa SMA/SMK/ sederajat, mahasiswa, akademisi, guru, serta kelompok masyarakat. KRENOVA berfungsi sebagai media untuk asistensi dan kurasi inovasi masyarakat oleh tim penilai. Para pemenang lomba akan menjadi model inovasi yang nantinya dapat diterapkan oleh perangkat daerah yang relevan sesuai dengan bidang inovasinya.

5. Rapat kerja dan evaluasi capaian inovasi

Rapat kerja berkala dengan perangkat daerah bertujuan untuk memantau progres pelaporan inovasi yang ada pada perangkat daerah, guna meningkatkan capaian Kota Balikpapan menuju kategori Kota Sangat Inovatif. Proses ini mencakup tahapan penginputan data inovasi serta data dukung terkait.

6. Pengembangan Aplikasi "Rumah Inovasiku"

Aplikasi Rumah Inovasiku dikembangkan dengan menambahkan fitur penilaian skor kematangan inovasi meriplikasi dari aplikasi IID/ IGA dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kedalaman dari setiap inovasi yang diinput dapat terukur dengan lebih akurat dan transparan.

III. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut di sajikan ikhtisar capaian kinerja sasaran 3 tahun 2024 yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 3 Pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja		
				Tidak Tercapai	Tercapai/ Sesuai Target	Melebihi Target
				<100%	=100%	>100%
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	105,53%			√

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2024

Dari tabel 3.11 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran ke tiga yaitu **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 3 dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP Bappeda Litbang** menunjukkan nilai capaian kinerja **105,53 %** dengan realisasi kinerja **75,98** dari target **72**. Capaian indikator di atas berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan dengan predikat “BB”. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sangat baik , di tandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Litbang

No	Komponen yang di nilai	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Hasil evaluasi	Bobot	Hasil evaluasi
1	Perencanaan kinerja	30	23,06	30	23,68
2	Pengukuran kinerja	30	17,04	30	20,71
3	Pelaporan kinerja	15	11,23	15	12,3
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	17,11	25	19,3
	Nilai akuntabilitas kinerja		68,44		75,98
	Tingkat akuntabilitas kinerja		B		BB

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kota Balikpapan Tahun 2024

Secara umum capaian terhadap target sudah baik. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

1. Memperhatikan hasil evaluasi SAKIP dan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan;
2. Adanya koordinasi yang baik antar bidang pengampu indikator di setiap komponen penilaian SAKIP.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluator, yaitu:

1. Melakukan survey kepada seluruh pegawai Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, guna pemanfaatan hasil perencanaan kinerja secara berkesinambungan;
2. Melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkala, setiap triwulan;
3. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sebagaimana rekomendasi yang disampaikan.

3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

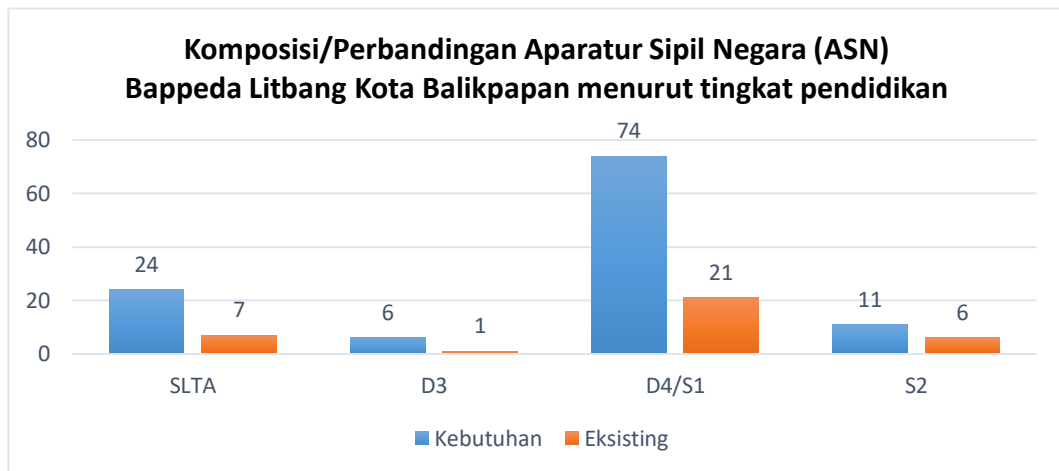
Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Bappeda Litbang Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 95 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bappeda Litbang Kota Balikpapan hanya didukung oleh 35 orang ASN/ PNS.

Tabel 3.13
Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Bappeda Litbang
menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki – laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Badan		1
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang Insfrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	
7	Kepala Subbagian Umum	1	
8	Kepala Subbagian Keuangan		1
9	Perencana Ahli Muda	2	6
10	Perencana Ahli Pertama		1
11	Fasilitator Pemerintahan		1
12	Analisis Pemanfaatan Iptek		1
13	Peneliti Ahli Muda	1	1
14	Analisis Data Ilmiah Muda	1	
15	Penelaah Teknis Kebijakan		5
16	Pengadministrasi Perkantoran	3	4
17	Penata Layanan Operasional	1	
Jumlah		14	21

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut :



Gambar. 3.4 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Litbang Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan D4/S1 berjumlah 21 orang atau 28,37% dari target, kemudian diikuti oleh pendidikan SLTA berjumlah 7 orang atau 29,16% dari target, pendidikan D3 berjumlah 1 orang atau 16,6% dari target, dan S2 berjumlah 6 orang atau 54,54%. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Bappeda Litbang Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Kontrak.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah Aset Yang dimiliki		Jumlah Aset yang tidak dipakai		Ket
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	
1	Sofa	9	57.276.000	-	-	-
2	Lambang Garuda Pancasila	2	12.960.000	-	-	-
3	Sepeda Motor	26	251.300.000	-	-	-
4	Filing Cabinet Besi	9	16.665.000	-	-	-
5	Mesin Ketik	7	43.527.500	-	-	-
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	7.104.668.040	-	-	-
7	Wireless	9	45.819.028	-	-	-
8	A.C. Window	61	375.735.950	-	-	-
9	Station Wagon Toyota Avanza/ Daihatsu Granmax	6	834.567.800	-	-	-
10	Papan Tulis	2	2.800.000	-	-	-
11	Peralatan Jaringan lainnya	10	191.719.720	-	-	-
12	Lemari Kayu	25	190.050.350	-	-	-
13	Meja Rapat	28	121.987.500	-	-	-
14	Meja Resepsionis	3	43.000.000	-	-	-
15	Televisi	21	347.266.150	-	-	-
16	Sound System	2	82.060.650	-	-	-
17	Alat Rumah Tangga Lain-lain	73	10.741.500	-	-	-
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	68	605.812.982	-	-	-
19	Peralatan Personal Komputer lainnya	13	74.532.000	-	-	-
20	Station Wagon Daihatsu / Granmax	2	278.264.000	-	-	-
21	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	20.200.000	-	-	-
22	Camera Video	15	133.276.000	-	-	-
23	Alat Pemadam/Portable	4	107.560.000	-	-	-
24	Layar Film/Projector	6	39.015.800	-	-	-
25	P.C Unit	85	683.875.100	-	-	-
26	Note Book	40	640.282.300	-	-	-
27	Hard Disk	45	90.147.200	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Aset Yang dimiliki		Jumlah Aset yang tidak dipakai		Ket
		Unit	(Rp)	Unit	(Rp)	
28	Monitor	7	416.140.000	-	-	-
29	External	19	64.272.250	-	-	-
30	Netware Interface External	2	4.000.000	-	-	-
31	Kaset	2	224.000	-	-	-
32	Peta (Map)	33	95.096.000	-	-	-
33	Handy Cam	3	26.575.000	-	-	-
34	Mesin Absen (Time Recorder)	3	30.100.000	-	-	-
35	Lemari Besi/Metal	3	20.170.000	-	-	-
36	Lemari Kayu	25	190.050.350	-	-	-
37	Meja Rapat	28	121.987.500	-	-	-
38	Kursi Rapat	102	117.445.400	-	-	-
39	Kursi Putar	69	22.224.000	-	-	-
40	Meja Komputer	24	10.388.850	-	-	-
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain	73	10.741.500	-	-	-
42	Facsimile	2	2.102.942	-	-	-
43	Lap Top	11	223.464.500	-	-	-
44	Tablet PC	1	18.887.000	-	-	-
45	Papan Pengumuman	11	5.040.000	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Litbang Kota Balikpapan

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapaun hasil perhitungan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada tahun 2024 di Bappeda Litbang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Nilai	43,82	42,87	97,83%	3.838.000.000	3.281.687.907	85,51%	12,60%	-
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Nilai	63,00	57,21	90,81%	4.070.000.000	3.801.779.937	93,41%	-2,86%	-
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	72,00	75,98	105,53%	11.531.148.000	10.606.847.767	91,98%	12,83%	Efisien

Sumber : Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024

Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pertama terserap dengan capaian kinerja 97,87% dan capaian penyerapan anggaran 95,97%. Capaian kinerja tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya. Demikian pula dengan anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran kedua terserap dengan capaian kinerja 90,81% dan capaian penyerapan anggaran 93,41%. Hal tersebut terjadi karena adanya sisa pagu dari nilai kontrak kerjasama/belanja pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya.

Sedangkan anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran ketiga telah mencukupi dengan capaian kinerja 105,53% dan capaian penyerapan anggaran 91,98%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 12,84%. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu:

- Meningkatnya nilai SAKIP Bappeda Litbang dari tahun sebelumnya;
- Penyerapan anggaran pada sasaran 3 tidak mencapai 100% karena:
 - Berkurangnya intensitas kunjungan tamu dari luar daerah sehingga mempengaruhi realisasi keuangan sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu.
 - Berkurangnya nilai tagihan rekening telepon kantor sehingga mempengaruhi realisasi keuangan pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Terdapat sisa anggaran pada sub kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional/lapangan. Hal ini karena berkurangnya tagihan bahan bakar minyak dan minimnya kerusakan pada kendaraan dinas.

3.2.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pada sub bab ini di sajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja) pada setiap sasaran strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada tahun 2024.

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial.

Berikut disajikan tabel beserta penjelasan mengenai program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja) pada sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial.

Tabel 3.16
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	97,87%	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	99.95%
				Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan	Indeks kualitas perencanaan aspek proses	100%
				Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	100%
				Kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan aspek jaminan tindak lanjut	100%
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	99.42%
				Kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%
				Kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%

Sumber : Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.16 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja tercapai sebesar 97,87%. Indikator ini dapat terlaksana melalui:

- I. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 99.95%. Capaian tersebut melebihi target yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses capaiannya 100%. Ketercapaian indikator tersebut di dukung oleh beberapa hal yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain:
 - Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 - Melaksanakan pendampingan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - Melaksanakan desk verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024;
 - Melaksanakan pendampingan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - Melaksanakan desk verifikasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 - Melaksanakan penyusunan Teknokratis Rencana Kerja Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
 - Melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA PD);
 - Memastikan keterkaitan, sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA PD) Pemerintah Kota Balikpapan dengan dokumen perencanaan di level Nasional, dan level Provinsi;
 - Memastikan keterkaitan, sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan di level Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA PD) Pemerintah Kota Balikpapan;
 - Melaksanakan proses penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA PD) sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku dan menggunakan pendekatan teknokratis (FGD dan Konsultasi Publik), partisipatif (Usulan Masyarakat Perseorangan/ Lembaga) , top down (keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi, dan Kota Balikpapan), bottom up (Rakorrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota), dan politik (Usulan Pokok-pokok Pikiran).
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan capaiannya 100%. Adapun hal yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah penginputan data baru dan pemutakhiran data pada aplikasi E-Database di seluruh kelurahan pada kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat. Data tersebut digunakan untuk melakukan analisis penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga

dilakukan Penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024.

3. Indeks Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut capaiannya 100%. Ketercapaian indikator tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, beberapa hal yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mendukung tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut:
 - Melaksanakan desk penyusunan kertas kerja evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - Melaksanakan desk penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024;
 - Bersinergi bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam mengembangkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengukuran kinerja untuk pelaksanaan evaluasi hasil perencanaan dan evaluasi pelaksanaan SAKIP dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan mengembangkan aplikasi REAKSI;
 - Melaksanakan rapat koordinasi terkait penggunaan aplikasi REAKSI dalam penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
 - Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Perubahan Tahun 2024 melalui aplikasi REAKSI.

II. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 99,42%. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian 100%. Tercapaiannya target tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan koordinasi berikut ini:
 - a. Koordinasi terkait dengan Pencegahan Stunting di Kota Balikpapan tahun 2024

Bappeda litbang sebagai wakil ketua Tim TPPS Kota Balikpapan yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan perencanaan terkait dengan pencegahan stunting di Kota Balikpapan, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan, Penjaringan Dan Penanganan Prevalensi Balita Pendek. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, bappeda litbang telah melakukan beberapa kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan rembuk stunting merupakan salah satu aksi konvergensi pencegahan stunting, oleh karena itu TPPS Kota Balikpapan melaksanakan rembuk stunting tingkat kota pada bulan Maret 2024 yang dipimpin oleh Ketua TPPS Kota Balikpapan. beberapa hal yang dibahas dalam pelaksanaan Rembuk stunting tingkat Kota yaitu kondisi stunting kota Balikpapan tahun 2024, kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 serta penetapan target prevalensi stunting tahun 2024 dan tahun 2025 yang di tuangkan dalam Berita Acara Rembuk Stunting Balikpapan.
- Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Stunting di Kota Balikpapan yang bekerjasama dengan ADINKES dan melibatkan TPPS Kota Balikpapan. Dalam penyusunan RAD tersebut, TPPS Kota Balikpapan mengadakan Rapat Koordinasi yang membahas terkait dengan data - data eksisting kondisi stunting di Kota Balikpapan, Analisa terhadap data tersebut dan rekomendasi Rencana 5 tahun kedepan dalam pencegahan stunting di Kota Balikpapan.
- Penetapan Wilayah yang menjadi pilot project pencegahan stunting di Kota Balikpapan yaitu Kelurahan Graha Indah. hal pertama yang diperbaiki adalah tata cara pengambilan data di lapangan dan peningkatan kapasitas kader.
- Rapat Koordinasi pengisian data pada web aksi bangsa kemendagri yang dihadiri oleh perangkat daerah yang merupakan anggota TPPS Kota Balikpapan dilakukan secara rutin per triwulan.

- TPPS Kota Balikpapan tahun 2024 melakukan penyusunan Juknis Rembuk Stunting baik pada tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, dalam juknis tersebut mengatur beberapa hal yaitu
 - Pelaksanaan rembuk stunting dan materi yang harus dibahas dalam rembuk tersebut
 - Kesepakatan dari rembuk stunting termasuk target stunting di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara
- Surat Edaran Wali Kota Balikpapan terkait dengan Pelaksanaan Rembuk stunting pada tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. Koordinasi terkait dengan alternatif pembiayaan selain APBD melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk Pelaporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2024:
 - Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di daerah. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyusunan dan distribusi Surat Wali Kota Balikpapan tentang pelaporan TJSLP, yang ditujukan kepada beberapa perusahaan yang beroperasi di Kota Balikpapan. Surat ini memberikan panduan kepada perusahaan untuk melaporkan kegiatan TJSLP yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana CSR. Sebagai hasilnya, sebagian besar perusahaan telah merespons dan mengirimkan laporan kegiatan mereka kepada Sekretariat TJSLP.
 - Selanjutnya, Sekretariat TJSLP dalam hal ini Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melakukan rekapitulasi laporan TJSLP dari perusahaan yang telah mengirimkan data pelaksanaan kegiatan mereka. Beberapa perusahaan di Kota Balikpapan telah melaporkan kegiatan TJSLP mereka.
 - Pemerintah Kota Balikpapan mengadakan pertemuan dengan pengurus Forum Pelaksanaan TJSLP Kota Balikpapan, yang bertujuan untuk menyusun rencana aksi forum di tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan TJSLP tahun 2023,

serta disepakati rencana aksi yang mencakup program prioritas daerah yang dapat didanai melalui TJSLP.

- Namun, kendala signifikan muncul dalam kepengurusan Forum Pelaksana TJSLP, yang masa jabatannya akan berakhir pada Juli 2024. Dengan berakhirnya kepengurusan tersebut, sejumlah fungsi forum tidak dapat berjalan dengan optimal. Salah satu dampak dari ketidakberlanjutannya kepengurusan ini adalah tidak terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) TJSLP, yang seharusnya menjadi sarana penting untuk menyusun rencana dan koordinasi lebih lanjut antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait prioritas penggunaan TJSLP. Tidak terlaksananya Musrenbang TJSLP ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang didorong oleh kontribusi TJSLP, serta menyulitkan proses perencanaan yang lebih terkoordinasi.
- Sekretariat TJSLP juga telah menyusun dan mendistribusikan Surat tentang Permohonan Inventarisasi Data Kegiatan TJSLP/CSR Tahun 2023-2024, yang ditujukan kepada seluruh perangkat daerah di Kota Balikpapan. Surat ini dimaksudkan untuk meminta perangkat daerah agar mengidentifikasi dan melaporkan kegiatan TJSLP yang relevan dengan program kerja mereka, guna memperbarui basis data dan menyelaraskan kegiatan TJSLP dengan kebutuhan masyarakat. Surat tersebut telah didistribusikan, dan respons dari perangkat daerah akan digunakan untuk memperbarui peta kebutuhan dan kontribusi TJSLP di tahun mendatang.
- Secara keseluruhan, kegiatan TJSLP di Kota Balikpapan pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala dalam pengelolaan Forum Pelaksana TJSLP yang berakhir pada Juli 2024. Kendala ini mempengaruhi efektivitas perencanaan dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, rekomendasi untuk tahun mendatang termasuk peningkatan komunikasi dengan perusahaan, memperluas cakupan program TJSLP, mempercepat proses pergantian kepengurusan Forum Pelaksana TJSLP, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pelaporan serta monitoring kegiatan.

- c. Koordinasi tim revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk tahun 2024
- Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. upaya ini dilakukan berangkat dari masalah tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi dan disumbang oleh lulusan sekolah menengah atas/kejuruan. Namun di sisi lain, pemerintah kota tidak punya kewenangan dalam mengintervensi, oleh karena itu perlu adanya jembatan kewenangan melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan strategi pendidikan vokasi di Kota Balikpapan adalah pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Pro Vokasi Balikpapan. Tim ini dibentuk melalui Surat Kepala Bappeda Litbang Nomor: 188.5.56/270/Bappeda Litbang, yang bertugas memastikan setiap langkah implementasi program berjalan sesuai rencana. Dengan koordinasi yang terstruktur dan efisien, tim ini menjadi penggerak utama dalam menjalankan strategi pendidikan vokasi. Selanjutnya, TKDV dibentuk sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk mensinergikan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan dunia industri. Pembentukan TKDV berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-2275/2024 memberikan legitimasi dan dasar hukum yang kuat bagi TKDV untuk menjalankan perannya dalam menyelaraskan kebutuhan industri dengan kurikulum pendidikan vokasi.
 - Sebagai panduan strategis pelaksanaan program, rencana aksi TKDV disusun untuk mencakup langkah-langkah terukur yang harus diambil dalam mewujudkan tujuan program secara bertahap. Rencana aksi ini dapat diakses secara daring melalui tautan resmi yang disediakan, yaitu https://bappeda.balikpapan.go.id/files/rencana_aksi_tkdv_20240602144838.pdf. Dalam upaya meningkatkan keterampilan peserta didik, program ini juga berhasil menjalin kerja sama pemagangan dengan delapan perusahaan di Kota Balikpapan. Melalui kerja sama ini, siswa vokasi diberikan akses langsung untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata,

yang sangat penting dalam membekali mereka dengan keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- Selain itu, program ini juga memperkuat kerja sama pendidikan vokasi dengan mitra industri, seperti melalui seminar ketenagakerjaan yang digelar bersama STIE Balikpapan. Inisiatif ini bertujuan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta mendukung pelaksanaan praktik kerja yang mencetak lulusan yang siap bersaing di pasar tenaga kerja. Tidak hanya itu, keberhasilan program ini juga membuka peluang untuk mereplikasi aksi perubahan di berbagai sektor dan wilayah lainnya. Replikasi ini menjadi indikator keberlanjutan program dan menunjukkan komitmen dalam memperluas dampak positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi secara berkelanjutan.
- d. Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Balikpapan terkait kemiskinan ekstrem
- Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan melalui berbagai program strategis dan kolaborasi lintas sektor berhasil mengambil langkah signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data awal, angka kemiskinan di Kota Balikpapan tahun 2023 tercatat sebesar 2,31% dari total penduduk, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 14.990 jiwa. Sementara itu keluarga miskin ekstrem berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2024 Kota Balikpapan sejumlah 27.802 keluarga. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data tersebut ditetapkan sebanyak 3.903 keluarga yang menjadi data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-186/2024 tanggal 12 Februari 2024..
 - Hasil verifikasi dan validasi P3KE di tahun 2024 menunjukkan tambahan sebanyak 209 keluarga miskin ekstrem. Dengan demikian, total sasaran keluarga miskin ekstrem yang menjadi target intervensi adalah 4.113 keluarga, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Wali Kota.
 - Untuk mendukung upaya ini, Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 462,7 miliar pada tahun 2024 melalui 12 OPD, 29

program, 37 kegiatan, dan 90 sub-kegiatan. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program prioritas, di antaranya:

- Subsidi BPJS Kesehatan Kelas 3 untuk pekerja bukan penerima upah dengan jumlah penerima mencapai 202.753 jiwa, termasuk ojek online, petani, dan nelayan, dengan total anggaran sebesar Rp 95,4 miliar.
- Pemberian bantuan kebutuhan pokok kepada lansia tidak mampu dan penyandang disabilitas berat, dengan penerima sebanyak 80 lansia dan 110 disabilitas, melalui anggaran sebesar Rp 1,54 miliar.
- Bantuan pangan CPPD kepada 4.000 keluarga yang masuk dalam DTKS dan P3KE sesuai peta rawan pangan, dengan total anggaran sebesar Rp 510 juta.
- Beasiswa pendidikan untuk 280 siswa SD dan 400 siswa SMP dari keluarga miskin non-PIP/non-PKH, melalui anggaran sebesar Rp 426 juta.
- Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan terdampak inflasi kepada 7.363 keluarga yang terdiri dari 3.903 keluarga sasaran miskin ekstrem, 1.911 pengendara ojek online, 1.015 petani, dan 536 nelayan dengan total anggaran sebesar Rp. 2,2 miliar.
- Program bantuan stimulasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi 135 keluarga MBR dengan anggaran sebesar Rp 3,375 miliar.
- Dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi, telah diselenggarakan 3 kali Job Fair pada tahun 2024, dengan rincian:
 - Job Fair I: 2.601 pencari kerja, 100 perusahaan, dan 1.781 lowongan kerja. Sebanyak 315 orang telah ditempatkan.
 - Job Fair II: 1.103 pencari kerja, 34 perusahaan, dan 969 lowongan kerja. Sebanyak 129 orang telah ditempatkan.
 - Job Fair III: 801 pencari kerja, 50 perusahaan, dan 1.171 lowongan kerja.
- Untuk mendukung kelompok rentan, telah diberikan 66 kursi roda kepada lansia dan penyandang disabilitas dengan anggaran Rp 300,2 juta, serta

- program pemberian seragam sekolah bagi peserta didik kelas 1 dan 7 baik di sekolah negeri maupun swasta, serta peserta didik kesetaraan.
- Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan efektivitas program, rapat rutin Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dilaksanakan secara berkala. Rapat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), guna memperkuat sinergi data dan evaluasi program. Salah satu kesepakatan penting yang dicapai adalah mengintegrasikan dan mengelaborasi berbagai sumber data seperti Sepakat, P3KE, DTKS, dan E-Database. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berbasis data yang valid.
 - Melalui sinergi lintas sektor, pengelolaan data yang akurat, dan pengalokasian anggaran yang optimal, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
- e. Koordinasi pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan khususnya Posyandu
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2024 Tentang Posyandu menyatakan bahwa posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang bertugas berdasarkan 6 SPM yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentaraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, berkaitan dengan hal tersebut maka posyandu memiliki struktur organisasi baru sehingga perlu dilakukan penyusunan struktur organisasi, syarat pembentukan posyandu dan mekanisme pemberian insentif kepada kader.
 - terkait hal tersebut, bappeda litbang melakukan koordinasi untuk melakukan integrasi ke dokumen perencanaan tahun 2025. pelaksanaan koordinasi dilakukan secara rutin baik yang diselenggarakan oleh Bappeda maupun DP3AKB. hasil dari koordinasi tahun 2024 yaitu Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Mendagri Nomor 13 tahun 2024. beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai kesepakatan RTL yaitu:
 - Penetapan SK Wali Kota Tentang Tim Pembina Posyandu Tingkat Kota

- Sosialisasi/edukasi kepada Perangkat Daerah yang memiliki SPM serta kecamatan dan kelurahan.
 - Selain itu, Pemerintah Kota berkoordinasi dengan provinsi dalam implementasi transformasi posyandu dengan penerapan 6 bidang SPM.
- f. Koordinasi pelaksanaan SPM Pendidikan Tahun 2024
- Pada tahun 2023, BPMP melakukan evaluasi pelaksanaan SPM bidang Pendidikan di Kota Balikpapan. hasil dari evaluasi tersebut menyatakan bahwa Kota Balikpapan belum memasukan semua kegiatan yang mendukung pencapaian SPM bidang pendidikan. Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan maka Bappeda Litbang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. hasil koordinasi tersebut yaitu kegiatan - kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang pendidikan didasarkan pada rapor pendidikan, sehingga langkah awal yang dilakukan oleh bappeda dengan dinas pendidikan yaitu:
 - melakukan pemetaan sub kegiatan berdasarkan permasalahan yang terdapat di rapor pendidikan.
 - melakukan pemetaan belanja pada sub kegiatan yang mendukung pencapaian SPM bidang pendidikan.
 - hasil pemetaan sub kegiatan dan belanja disinkronkan dengan dokumen perencanaan baik tingkat kota maupun tingkat perangkat daerah.
 - Hasil dari kegiatan tersebut terdapat 34 sub kegiatan yang mendukung pencapaian SPM bidang pendidikan, tetapi masih terdapat 1 sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Kelas PAUD. hal ini dikarenakan PAUD negeri di Kota Balikpapan hanya 1 unit sekolah dan tahun 2023 telah dilakukan rehab kelas dan mekanisme rehab kelas PAUD swasta belum diatur.
- g. Pendampingan penyusunan kajian Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Litbang Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam mendukung dan memastikan keberhasilan penyusunan dokumen kajian standar pemenuhan fasilitas/sarana prasarana Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Dalam kajian yang disusun 2023 ini, Bappeda Litbang bertindak sebagai fasilitator

untuk menjembatani komunikasi, koordinasi lintas sektor, dan Perangkat Daerah terkait, guna memastikan tercapainya tujuan bersama dalam perencanaan fasilitas ramah anak.

- Peran Bappeda Litbang meliputi:

1) Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran

Bappeda Litbang memastikan penyelarasan kajian ini dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan RKPD. Selain itu, Bappeda Litbang juga memberikan masukan terhadap alokasi anggaran yang efisien untuk implementasi hasil kajian.

2) Menjembatani Koordinasi Lintas Sektor dan Perangkat Daerah

Bappeda Litbang berperan sebagai penghubung antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan perangkat daerah terkait lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap aspek perencanaan RBRA mendapatkan dukungan lintas sektor, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

3) Sinergi Kebijakan

Bappeda Litbang membantu mengintegrasikan berbagai kebijakan dan regulasi daerah maupun nasional yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kebijakan Kota Layak Anak, ke dalam dokumen kajian ini, sehingga hasil kajian dapat dijadikan acuan dalam pembangunan fasilitas.

4) Monitoring dan Evaluasi

Bappeda Litbang terlibat dalam memonitor tahapan penyusunan dokumen, memastikan keluaran kajian mencakup semua aspek yang disyaratkan, seperti analisis eksisting, identifikasi kebutuhan alat bermain ramah anak, serta rekomendasi pra desain dan perencanaan anggaran.

5) Advokasi dan Sosialisasi

Untuk meningkatkan dukungan publik dan pemangku kepentingan, Bappeda Litbang mengadvokasi pentingnya ruang bermain ramah anak sebagai bagian dari visi kota layak anak dan melakukan sosialisasi hasil kajian kepada masyarakat.

- Melalui perannya yang multidimensi, Bappeda Litbang berkomitmen untuk menjadi penggerak utama dalam keberlanjutan implementasi hasil kajian, memastikan bahwa ruang bermain anak di Kota Balikpapan tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

h. Rapat koordinasi gugus tugas KLA

Bappeda Litbang sebagai wakil ketua gugus tugas KLA telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Pendampingan dalam evaluasi kota layak anak
- Akselerasi pembaruan kepengurusan Forum Anak di tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Balikpapan

i. Koordinasi untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota inklusi

Pada tahun 2024 sudah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung terwujudnya kota Balikpapan sebagai kota Inklusi:

- Fasilitasi penyusunan rancangan perwali pemenuhan hak disabilitas bersama Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK), organisasi penyandang disabilitas, dan Perangkat Daerah terkait. Dari kegiatan ini dihasilkan Rancangan Perwali Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sedang dalam tahapan harmonisasi di Kanwil Kemenkumhan Kalimantan Timur.
- Pendampingan penyusunan rancangan perwali jaminan sosial bagi pekerja rentan bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan sebagai *leading sector* sehingga dihasilkan Rancangan Perwali Perlindungan Pekerja Rentan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sedang dalam tahapan harmonisasaidi Kanwil Kemenkumhan Kalimantan Timur.
- Koordinasi pemetaan kebutuhan pelatihan bagi penyandang disabilitas bersama SIGAB dan perangkat daerah terkait yang menghasilkan Berita

Acara Peningkatan Keterampilan Bagil Difabel dan Komitmen Penyediaan Kuota Difabel Dalam Pelatihan berisi 9 (sembilan) jenis pelatihan ramah difabel.

- j. Pendampingan Penyelenggaraan Rakorebang Kelurahan di 34 Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan di 6 Kecamatan
- Dalam rangka memastikan berjalan optimalnya perencanaan pembangunan Kota Balikpapan melalui pendekatan *bottom-up* (bawah ke atas) serta pendekatan partisipatif, Bappeda Litbang melakukan pendampingan secara intens mulai dari mekanisme pengajuan usulan masyarakat yang berlanjut pada penyelenggaraan Rakorebang di 34 Kelurahan hingga berlanjut ke Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan di 6 Kecamatan se-Kota Balikpapan
 - Koordinasi Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
 - Koordinasi Penetapan Tema dan Skala Reformasi Birokrasi Tematik Kota Balikpapan Tahun 2024
 - Koordinasi Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan *Mandatory Spending* dan Penerimaan Daerah dalam Rangka Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s/d Semester I 2023
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kota Balikpapan Tahun 2024
 - Pada Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Balikpapan Tahun 2024 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda Litbang merupakan salah satu organisasi yang ditunjuk sebagai Pelaksana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan memiliki peran sebagai koordinator bidang perencanaan. RPKB sendiri merupakan penjabaran lebih lanjut kerangka kerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kedaruratan bencana (kerangka kerja saat bencana) yang dituangkan di dalam dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB). RPKB merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam

penanggulangan bencana, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemetaan sumber daya di masing-masing sektor dan lembaga.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) capaiannya 100%. Tercapainya target tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan koordinasi berikut ini:

- Sinkronisasi penyusunan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2024;
- FGD Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD 2025;
- Sinkronisasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah bidang perekonomian;
- Perencanaan konsep HITS terkait fokus pembangunan 2025 Peningkatan Produktivitas Ekonomi Dan Investasi Daerah;
- Penerapan CDP NUDP dalam rangka *Assessment Public Investment Management Assessment (PIMA)* dan *Municipal Finance Self Assessment (MFSA)*;
- Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Rakor pengendalian inflasi dan penanganan dampak inflasi, HLM sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi jelang HBKN Idul Fitri 1445 H;
- Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
- Rapat koordinasi awal penyaluran CPP bantuan pangan tahun 2024;
- Integrasi dan implementasi NUDP dalam perencanaan Kota Balikpapan: Capital Investment Planning (CIP) termasuk analisa dampak anggaran dan dampak ekonomi; CPS;
- Sinkronisasi prioritas RKPD 2025 program unggulan penataan kawasan terintegrasi Pasar Klandasan Kota Balikpapan, upaya branding Pasar Inpres Kebun Sayur;
- Koordinasi sinkronisasi *Tri-City Collaboration*;

- EIPP Fase 4 Proyek 1 (*Master Plan for Development RE100 and Review*) dan Proyek 2 (*Becoming Indonesia as a Global Logistic Hub: Optimizing The Role of Indonesia SOE in The East Kalimantan Port Sector*);
- Program Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek RIRU KALTIM;
- Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025;
- Pra Musrenbang RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025;
- Sinkronisasi keselarasan misi RPJPD dengan Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 (sesuai 4 tahap periodisasi) terkait bidang perekonomian, lingkungan/SDA/ekologi dan konektivitas wilayah;
- Desk penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 perangkat daerah bidang perekonomian;
- koordinasi persiapan kurasi dan fasilitasi sertifikasi UMKM Binaan Kota Balikpapan
- Koordinasi Pelaksanaan Program *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund* (FCPFCF) dari alokasi Kinerja (Performance) untuk Pemerintah Desa/Kelurahan dan Penghargaan (*Rewards*) untuk Kelompok Masyarakat;
- Sinkronisasi dan finalisasi pengajuan usulan BL dan Bankeu Provinsi 2025;
- Sinkronisasi Pelaksanaan Rakernas APEKSI Ke-17 Tahun 2024;
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kota Balikpapan;
- Sinkronisasi Upaya Pemanfaatan Lahan Pondok Pesantren mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren;
- Asistensi dan sinkronisasi Pra-RKA 2025 perangkat daerah bidang perekonomian;
- Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan renja perangkat daerah bidang perekonomian;
- Sinkronisasi upaya akselerasi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Kariangau;
- Sinkronisasi RB Tematik untuk tema Peningkatan Investasi (sasaran tematik: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah);

- Sinkronisasi kajian terkait bidang perekonomian a.l: Peta Potensi dan Peluang Investasi, strategi promosi bidang penanaman modal, Kajian ketahanan pangan pada rumah tangga, Pemberian Insentif Investasi dan Kemudahan Berusaha, Rencana Aksi Pembangunan Industri, Grand Design dan Model Bisnis Pariwisata Kota Balikpapan, Penyelenggaraan Keolahragaan, Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Pangan Lokal dalam Perspektif Ketahanan dan Kemandirian Pangan;
 - Koordinasi/asistensi verifikasi keselarasan indikator, prioritas nasional dan provinsi, dalam rangka penetapan Rankhir Renja perangkat daerah bidang perekonomian;
 - Analisis capaian program prioritas: Balikpapan Kota Kreatif dan MICE;
 - Asistensi RKA perangkat daerah bidang perekonomian;
 - pembahasan peluang penanaman modal daerah mitra IKN penunjang IKN;
 - Persiapan event prioritas 2025 ALKI/Nusantara Tourism Investment Forum 2025;
 - Koordinasi bersama Kemenparekraf RI dan DPOP Kota Balikpapan dalam rangka Pre-Studi Potensi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Ibu Kota Nusantara (IKN)
 - Sub kegiatan pengelolaan RTH Kota
 - Kajian Studi Kelayakan RTH Mangrove Baru Ulu
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bukit Cinta
 - Fisik Toilet TPU Terpadu KM. 15, DED, Supervisi
 - Fisik Jalan Paving Hutan Kota Rambai DED, Supervisi
 - Fisik Siring TPU Taman Merdeka DED, Supervisi
 - Fisik Pembangunan Siring TPU Terpadu KM. 15
 - Fisik Peningkatan Taman Tugu KB DED, Supervisi
 - Fisik Peningkatan Taman Pesut DED, Supervisi
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan capaiannya 100%. Tercapaiannya target tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan koordinasi berikut ini:

- Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai simpul KPBU sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-114/2024 tentang Penunjukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Balikpapan Sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur telah berkoordinasi dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan mengenai kelanjutan Proyek KPBU TPAS Manggar. Kementerian Keuangan RI telah mengeluarkan persetujuan atas Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (*Final Business Case/FBC*) Proyek KPBU TPAS Manggar Kota Balikpapan ("Proyek"). Laporan Awal FBC telah memenuhi spesifikasi hasil keluaran yang tercantum dalam Perjanjian Penugasan, serta telah mencakup substansi yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Proyek TPAS Manggar. Langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan Tim KPBU pada tahun 2025 adalah Persiapan Audiensi kepada Wali Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan, Pembahasan Rencana Penyusunan Peraturan Daerah dan Nota Kesepahaman, serta persiapan *market sounding*.
- Bappeda Litbang telah menginisiasi Rencana SPAM Regional dengan Pemanfaatan Sungai Mahakam Sebagai Sumber Air Baku Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk mengatasi defisit air baku di Kota Balikpapan, salah satu alternatif yang dapat ditindaklanjuti adalah pemanfaatan Sungai Mahakam. Untuk pemanfaatan Sungai Mahakam akan melewati beberapa kabupaten/kota sehingga perlu bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempayungi kabupaten/kota yang dilewati. Sebagai langkah awal dalam penyusunan *Pra Feasibility Study* yang akan dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, perlu disusun Kesepakatan Bersama antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan Perumda Air Minum Danum Taka Kab. Penajam Paser Utara dengan Direktur Utama PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai alternatif air minum masyarakat.

- Selain yang bersumber dari Sungai Mahakam, Bappeda Litbang telah berkoordinasi dengan stakeholders terkait untuk alternatif pemanfaatan air laut (desalinasi) dengan ruang lingkup pekerjaan di daerah: Kelurahan Marga Sari, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margo Mulyo, Kelurahan Baru Tengah, dan Kelurahan Baru Ulu. Pembiayaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) opsi yaitu: melalui APBD Pemerintah Kota Balikpapan atau melalui penyertaan modal. Sementara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan akan melakukan perhitungan biaya produksi. Mengingat defisit air baku di Kota Balikpapan sudah mencapai 905 lps pada tahun 2024, maka perlu percepatan penanganan jangka pendek, salah satunya dilakukan melalui percepatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Desalinasi di Kota Balikpapan. Selain pertimbangan kecepatan terbangunnya infrastruktur juga berdasarkan resiko pengelolaan keuangan, maka metode yang akan digunakan adalah opsi B2B dengan TSM Perseroda dengan pembelian air curah oleh PTMB Kota Balikpapan.
- Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, dan *The World Bank* mengenai *Pre-Appraisal Mission for Citywide Inclusive Sanitation - Safely Managed Urban Sanitation Services Project* (CISP-SaniManTap). Kota Balikpapan telah melengkapi *Readiness Criteria* sebagai persyaratan peningkatan kapasitas IPLT Manggar. Dengan kelengkapan RC yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota *project* lainnya, hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Balikpapan terhadap air minum dan sanitasi aman di Kota Balikpapan.
- Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR, BPPW Kalimantan Timur, Kemitraan Indonesia Australia Untuk Infrastruktur (KIAT), BKAD, DPU, DLH, DKUMKMP, dan PTMB mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan IPAL Kota Balikpapan. Adapun lokasi proyek utama di Balikpapan yaitu IPAL Margasari, IPAL Sumber, dan IPAL Perusda atau Sepinggan. Dokumen Perencanaan ini mencakup Studi Kelayakan, Desain Teknik dasar IPAL, dan Desain Rekayasa Jaringan Air Limbah.
- Bappeda Litbang berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, JICA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, mengenai tindak lanjut kerjasama

antara pihak Pemerintah Kota Balikpapan dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang difasilitasi oleh Bappenas terkait perumusan rencana pembangunan tiga kota yaitu Ibu Kota Nusantara – Samarinda – Balikpapan. Dengan kolaborasi *Tri-City* diharapkan akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional baru. Ke depan, konsep pengembangan *Tri-City* perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan masing-masing baik oleh Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, maupun Kota Samarinda. Termasuk dengan pengembangan kapasitas ASN Bappenas dan Kota Balikpapan untuk melakukan *On the Job Training* di Kota Yokohama, Jepang.

- Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan perangkat daerah terkait mengenai Rencana Pembangunan *Coastal Area*. Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara, dipandang perlu untuk didorong percepatan penyelesaian perizinannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan akan memfasilitasi rapat koordinasi evaluasi progres *Coastal Area* Kota Balikpapan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada awal tahun 2025, Kemudian akan mengusulkan *Coastal Area* sebagai Proyek Strategis Nasional.
- Menindaklanjuti Surat Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor: B.194/Kepala/Otoritas IKN/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Perihal Permohonan Usulan Penetapan Daerah Mitra IKN Tahap 1, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai Usulan Kawasan Yang Akan Ditetapkan Sebagai Daerah Mitra IKN Untuk Mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal. Beberapa kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Daerah Mitra IKN untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal antara lain: Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan lain menunjang Super Hub Ekonomi IKN yaitu Kawasan Pariwisata, Ekonomi, Industri, serta Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan akan dilakukan assesment oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait.
- Menghubung Surat Interim *Manager of Digireg* Indonesia Nomor: 04IDRI-IM/0L/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Permohonan Audiensi, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan BKAD, DPPR, dan DPU

untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dengan membantu pemerintah untuk membuat, mengolah, dan penyebaran informasi berbasis data dalam pengambilan keputusan. Yaitu dengan mengkombinasikan data-data administrasi pemerintahan dengan data lokasi/spasial. *Digireg* adalah grup konsultan internasional yang bergerak dalam bidang *Geo-Data Management* yang saat ini beroperasi di empat negara, salah satunya Indonesia yang memiliki dua cabang, Jakarta dan Balikpapan. *Digireg* menggunakan proses ETL (*Extract, Transform, and Load*) yaitu proses yang mengambil dan menggabungkan data-data ke dalam suatu sistem gudang data (*database*), yang didalamnya akan dilakukan analitik data serta *Machine Learning* untuk membentuk suatu otomatisasi alur kerja. *Digireg* Indonesia akan mendalami ke Perangkat Daerah terkait (BKAD, DPPR, dan DPU) mengenai isu yang dihadapi masing-masing perangkat daerah untuk menemukan metode penanganan yang paling tepat dan efisien. Terutama untuk pemetaan aset Kota Balikpapan

- Dalam rangka Persiapan Penerapan *Capital Investment Planning* pada perangkat daerah Pilot Dalam Penyusunan Renja 2025, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Hubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Adapun paket pekerjaan infrastruktur yang akan dilakukan pilot project *Capital Investment Planning* (CIP) sebagai salah satu program dari *National Urban Development Program* (NUDP) untuk penguatan perencanaan pembangunan kota adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Paket Pekerjaan Infrastruktur Pilot Project CIP Program NUDP
Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Belanja Infrastruktur Prioritas
1	DPPR	Pembangunan <i>jogging track</i> Stadion Batakan
		Penataan kawasan Kuliner Ruhui Rahayu
2	Disdik	Pembangunan SMP Balikpapan Timur
		Pembangunan TK Balikpapan Utara

No	Perangkat Daerah	Belanja Infrastruktur Prioritas
		Pembangunan SD di Balikpapan Timur
3	Diskominfo	Pengadaan jaringan wifi gratis
		Pengadaan videotron
4	Disdag	Pembangunan Blok D Pasar Klandasan
		Revitalisasi Pasar Sepinggian
		Revitalisasi Pasar BP
		Revitalisasi Pasar Inpres
5	Disperkim	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		Penanganan kawasan kumuh Karang Rejo
		Penanganan kawasan kumuh Karang Jati
6	Dinkes	Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat
		Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur
		Renovasi Puskesmas Sepinggian
7	Dishub	Pembangunan SAUM
		Pembangunan terminal type c (teritip dan kampung baru)
		Revitalisasi terminal BP
		Pembangunan Dermaga eks Paradise
		Pembangunan Depo Kontainer KM 13
8	Disporapar	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pantai Manggar
9	DKUMKMP	Peningkatan sarana dan prasana SIKS
		Peningkatan sarana dan prasana SIKT
10	DPU	Pembangunan Gedung Disdag Dan DP3
		Renovasi Kelurahan Klandasan Ulu
		Pembangunan Smart City Center
		Pembangunan Jalan Tembus Balikpapan Regency-Borneo Paradiso
		Rehabilitasi Jalan MT Haryono
		Pembangunan jembatan atas air
		Pembangunan Saluran Sekunder Balikpapan Baru
		Pembangunan Rumah Pompa Dan Saluran Primer Klandasan
		Peningkatan Bendali Wonorejo
		Pembangunan TPST Graha Indah
		Pembangunan SPAM jaringan perpipan
		Pembangunan IPAL KM 7

Sumber : Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024

- Menindaklanjuti Surat Komandan Kodim 0905/Balikpapan Nomor: B/628/V/2024 Tanggal 7 Mei 2024 Perihal Permohonan Sasaran TMMD Ke-123 Triwulan I TA 2025, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan DPU untuk menentukan lokus sasaran TMMD Tahun 2025, dimana terdapat 2 fokus utama yaitu: Rekonstruksi Jalan dan Perbaikan RTLH/sanitasi berbasis data Keluarga Rawan Stunting (KRS).
- Revitalisasi kawasan sekitar taman Bekapai (segemen sisi kantor PLN - Sisi TK Bayangkari) dan supervisi
- Pembangunan landmark Stadion Batakan dan supervisi
- Belanja Dokumen masterplan dan DED penataan Kawasan kuliner Terminal Batu Ampar
- Dokumen Review DED Lanjutan Trotoar A. Yani
- Dokumen Desain Landark Balikpapan Tengah (simpang gn. Sari- Gn Pasir)
- Pangadaaan Lahan Simpang Muara Rapak
- Penetapan Perda RTRW Kota Balikpapan No 5 Tahun 2024 dan sosialisasi se kecamatan di Kota Balikpapan

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah

Berikut disajikan tabel beserta penjelasan mengenai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja) pada sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah.

Tabel 3.18
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 2

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui	Indeks inovasi daerah	98.24%	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	penelitian, pengembangan dan inovasi daerah			Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	100%
				Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	100%
				Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%
				Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	100%

Sumber : Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.18 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja inovasi daerah telah tercapai sebesar sebesar 98,24%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program penelitian dan pengembangan daerah dengan capaian 100%. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti capaiannya sebesar 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2024 adalah Penyusunan dokumen indeks kualitas perencanaan Kota Balikpapan;
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan

kependudukan yang ditindaklanjuti capaiannya 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2024 adalah Penyusunan Dokumen Grand Desain Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang ditindaklanjuti capaiannya 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2024 adalah Penyusunan Dokumen Grand Desain Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024-2029.
4. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan capaiannya 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2024 adalah:
 - Penyusunan Kajian Survey Indeks pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2024
 - Penyusunan Kajian Penentuan Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga Di Kota Balikpapan;
 - Penyusunan analisis kajian data metocean, hidro dinamika dan sedimentasi pantai teritip;
 - Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Pemerintahan Baru di Kota Balikpapan;
 - Penyusunan Kajian Penerapan Sponge City di Kota Balikpapan;
5. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi capaiannya 100%. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahun 2024 adalah:
 - Pelaksanaan Lomba Inovasi;
 - Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif kepada stakeholder terkait;
 - Publikasi jurnal dari hasil kajian/penelitian;
 - Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual (CIPTA) bagi peserta lomba KRENOVA.

3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah

Berikut disajikan tabel beserta penjelasan mengenai program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja) pada sasaran ketiga yaitu Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.19
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	105,53%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Indeks kepuasan masyarakat (Internal)	97,06%
				Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	97,15%
				Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	98,09%
				Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	IKM layanan administrasi umum perangkat daerah	97,24%
				Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	99,26%
				Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	101,59%

Sumber : Data diolah Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.21 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Bappeda Litbang capaiannya sebesar 105,53%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan capaian 97,06%. kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

1. Kegiatan dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal (IKM) berdasarkan layanan kesekretariatan yaitu kegiatan:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah capaiannya sebesar 97,15%;
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaiannya 98,09%;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator IKM layanan administrasi umum perangkat daerah capaiannya 97,24%;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah capaiannya 99,26%;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator IKM layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah capaiannya 101,59%.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk perbaikan dalam pelayanan kesekretariatan adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi SOP Sekretariat kepada pengguna layanan internal Bappeda Litbang;
2. Melakukan evaluasi SOP Sekretariat Bappeda Litbang;
3. Meningkatkan pemahaman SOP Sekretariat Bappeda Litbang bagi petugas pelayanan sekretariat;
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan OPD Pembina kesekretariatan terkait SOP yang telah disusun serta pengukuran IKM yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Litbang secara mandiri.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar **91,004%** dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.531.148.000	10.606.847.767	91,98%
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	7.839.274.000	7.230.716.868	92,24%
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	7.839.274.000	7.230.716.868	92,24%
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	766.934.100	737.672.919	96,18%
Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	766.934.100	737.672.919	96,18%
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1.892.325.900	1.764.902.867	93,27%
Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.996.100	9.706.950	97,11%
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	424.362.800	411.445.538	96,96%
Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	441.207.000	401.789.136	91,07%
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000.000	68.680.400	85,85%
Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	6.760.000	5.424.000	80,24%
Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	30.000.000	19.750.200	65,83%
Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	900.000.000	848.106.643	94,23%
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	470.117.000	435.353.486	92,61%
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	3.996.600	3.187.500	79,76%
Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.963.500	14.246.370	49,19%
Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	37.967.640	33.841.600	89,13%
Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	399.189.260	384.078.016	96,21%
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	562.497.000	438.201.627	77,90%

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan ajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	216.114.000	150.980.487	69,86%
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	161.000.000	108.034.248	67,10%
Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	58.000.000	55.162.005	95,11%
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	127.383.000	124.024.887	97,36%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.838.000.000	3.281.687.907	85,51%
Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan	1.752.000.000	1.508.850.140	86,12%
Sub kegiatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/Kota	1.752.000.000	1.508.850.140	86,12%
Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	1.021.000.000	984.142.256	96,39%
Sub kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	812.376.500	781.081.906	96,15%
Sub kegiatan penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	208.623.500	203.060.350	97,33%
Kegiatan pengendalian, evaluasi dan elaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	1.065.000.000	788.695.511	74,06%
Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	1.065.000.000	788.695.511	74,06%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.070.000.000	3.801.779.937	93,41%
Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	350.000.000	332.894.626	95,11%
Sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	325.000.000	316.054.626	97,25%
Sub kegiatan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	25.000.000	16.840.000	67,36%

Uraian	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Capaian
Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1.100.000.000	1.041.657.262	94,70%
Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	600.000.000	550.228.065	91,70%
Sub kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan	500.000.000	498.429.197	99,69%
Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1.620.000.000	1.577.216.900	97,36%
Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	270.000.000	259.186.909	96,00%
Sub kegiatan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	500.000.000	470.743.471	94,15%
Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	850.000.000	847.286.520	99,68%
Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi	1.000.000.000	843.011.149	84,30%
Sub kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	150.000.000	144.499.000	96,33%
Sub kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	550.000.000	450.889.887	81,98%
Sub kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	175.000.000	139.995.529	80,00%
Sub kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual	125.000.000	107.626.733	86,10%
TOTAL	19.439.148.000	17.690.315.611	91,004%

Sumber : SPJ Fungsional Bappeda Litbang Bulan Desember Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum, Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada Tahun 2024 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari tiga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja yang menjadi target pada Tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar **98,06%**. Capaian indikator tersebut terlaksana melalui empat program yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan juga peran masyarakat yang ikut serta dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan Kota Balikpapan. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai **91,004%** dari total Anggaran Belanja Langsung, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar **7,056%**.

4.2 Saran

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam menyampaikan aspirasi atau usulan program dan kegiatan pembangunan;
2. Perlu adanya petunjuk serta pendampingan dalam menyusun Rencana Strategis serta Rencana Kerja perangkat daerah sehingga terdapat perencanaan yang terarah dan konsisten;
3. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah Kota Balikpapan, baik legislatif dan eksekutif dalam penyusunan atau pembahasan dokumen perencanaan;
4. Sosialisasi, regulasi dan monitoring yang mengharuskan komitmen eksekutif dan legislatif untuk menjamin integrasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;

5. Melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian, studi dan kajian yang belum ditindak lanjuti oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan ataupun perangkat daerah teknis lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clear Government* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Litbang Kota Balikpapan ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Balikpapan. Semoga pada tahun mendatang kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, 25 Maret 2025
Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan

